

# BAB I

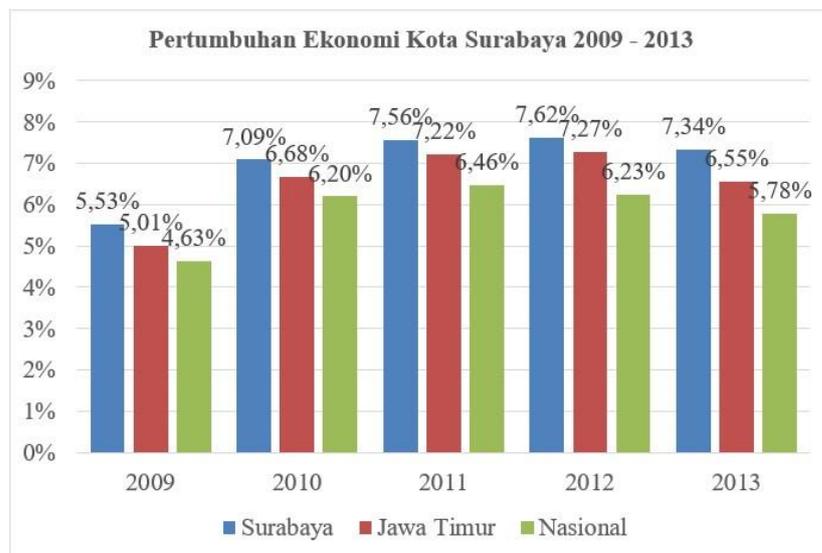
## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Surabaya terletak di timur laut Pulau Jawa yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan memiliki luas 330,45 Km<sup>2</sup>. Kota Surabaya juga berada di jalur perdagangan Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia yang menjadi arus perdagangan ekspor-impor serta antar daerah untuk barang dan jasa. Kemampuan ekonomi Kota Surabaya sangat besar ditinjau berdasarkan aspek infrastruktur seperti pelabuhan internasional, bandara internasional, fasilitas pergudangan, kebutuhan energi, dan transportasi (Istifadah *et al*, 2017).

Perekonomian Kota Surabaya dinilai berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Berikut persentase pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2009-2013:

Grafik 1.1 Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2009-2013



Sumber: [surabayakota.bps.go.id](http://surabayakota.bps.go.id), 2015

Berdasarkan grafik 1.1 persentase pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebesar 2.762.308 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Surabaya 2010

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	111.524	105.659	217.183
5-9	114.640	108.390	223.030
10-14	103.696	99.292	202.988
15-19	105.915	117.883	223.798
20-24	126.867	137.654	264.521
25-29	145.281	147.321	292.602
30-34	132.554	132.805	265.359
35-39	122.453	120.964	243.417
40-44	104.370	106.826	211.196
45-49	84.915	90.832	175.747
50-54	72.796	74.428	147.224
55-59	54.641	52.647	107.288
60-64	32.668	35.382	68.050
65-69	24.997	26.742	51.739
70-74	14.798	18.807	33.605
75+	13.368	21.193	34.561

*Sumber: surabayakota.bps.go.id, 2018*

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa usia produktif dengan rentang usia 15-64 tahun di Kota Surabaya berjumlah 1.999.202 jiwa. Menurut BPS rentang usia produktif yaitu 15-64 tahun. Dikutip dari finansial.bisnis.com, sebagian besar ketentuan perusahaan menetapkan usia 55 tahun sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa batasan usia pensiun sesuai

dengan ketetapan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), dan perjanjian kerja bersama (PKB), atau peraturan perundang-undangan. Sehingga pada penelitian ini menetapkan usia produktif 15-55 tahun berjumlah 1.931.152 jiwa.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sri Rahayu Widodo mengatakan bahwa pendidikan mengenai keuangan perlu dikenalkan sejak dini sehingga literasi keuangan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi, inklusi sosial, dan berkontribusi terhadap kesehatan ekonomi suatu negara. Otoritas Jasa Keuangan juga bekerjasama dengan Kemendikbud dengan memasukkan materi pengetahuan keuangan pada mata pelajaran di sekolah menengah atas ([id.beritasatu.com](http://id.beritasatu.com)).

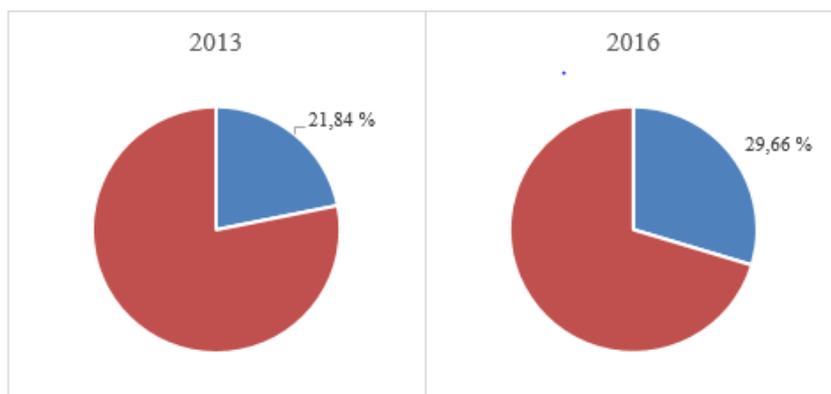
Berdasarkan survei yang dilakukan OJK pada tahun 2013 bahwa Tingkat literasi keuangan penduduk negara Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Well literate* sebesar 21,84 persen yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan tentang lembaga jasa serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban.
2. *Sufficient literate* sebesar 75,69 persen yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban.
3. *Less literate* sebesar 2,06 persen yaitu memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk, dan jasa keuangan.
4. *Not literate* 0,41 persen tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban.

Agar terciptanya masyarakat yang dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya, maka masyarakat harus mengerti manfaat dan risikonya secara rinci, memahami hak dan kewajiban serta yakin bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hasil dari masyarakat memahami mengenai

manfaat dan risiko produk layanan jasa keuangan adalah bertumbuhnya lembaga keuangan dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat (Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Literasi keuangan menurut Organisation for *Economic Co-operation and Development (OECD)* pada tahun 2014 merupakan pengetahuan mengenai keuangan secara konsep dan menerapkannya, sehingga mampu membuat keputusan yang tepat demi kesejahteraan kehidupan ekonominya. Unsur kesejahteraan ekonomi yaitu terkontrolnya tingkat konsumsi yang dilakukan masyarakat.



Gambar 1.1 Indeks Literasi Keuangan 2013-2016

*Sumber: Ojk.go.id, 2013 dan 2016*

Pada gambar 1.1 indeks literasi keuangan Indonesia mulai tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan 7,82 persen. Hal itu menunjukkan kondisi tingkat literasi keuangan membaik meskipun tidak terlampau jauh.

Tabel 1.2 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi berdasarkan Strata Wilayah

No	Nama Provinsi	Nama Kota/Kabupaten	Indeks Literasi Keuangan
1	Aceh	Banda Aceh	40,40%
		Pidie	25,20%
2	Sumatera Utara	Medan	35,50%
		Toba Samosir	27,00%

*(Bersambung)*

(Sambungan)

3	Sumatera Barat	Padang	34,30%
		Padang Pariaman	20,30%
4	Riau	Pekanbaru	43,10%
		Indragiri Hilir	15,90%
5	Jambi	Jambi	33,60%
		Sorolangun	20,30%
6	Sumatera Selatan	Palembang	34,80%
		Muara Enim	27,70%
7	Bengkulu	Bengkulu	35,30%
		Kepahiang	19,90%
8	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	29,50%
9	Lampung	Bandar Lampung	27,50%
		Lampung Barat	26,30%
10	Kepulauan Riau	Batam	37,10%
11	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	58,40%
		Kepulauan Seribu	21,70%
12	Jawa Barat	Bandung	49,20%
		Cirebon	18,70%
		Tasikmalaya	30,00%
13	Jawa Tengah	Semarang	44,10%
		Solo	34,90%
		Banyumas	21,70%
14	DI Yogyakarta	Yogyakarta	44,50%
		Sleman	32,60%
15	Jawa Timur	Surabaya	45,90%
		Malang	33,90%

(Bersambung)

(Sambungan)

		Jember	26,60%
16	Banten	Tangerang	40,90%
		Serang	35,50%
17	Bali	Denpasar	42,90%
		Buleleng	32,40%
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	21,90%
		Lombok Timur	21,00%
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	26,30%
		Flores Timur	29,70%
20	Kalimantan Barat	Pontianak	40,10%
		Landak	21,00%
21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	27,00%
		Barito Selatan	25,40%
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	26,30%
		Hulu Tengah Sungai	20,30%
23	Kalimantan Timur	Samarinda	40,90%
		Kutai Timur	20,30%
24	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	26,50%
25	Sulawesi Utara	Manado	32,80%
		Bolaang Mongondow Utara	24,60%
26	Sulawesi Tengah	Palu	29,00%
		Donggala	16,10%
27	Sulawesi Selatan	Makassar	37,20%
		Luwu Timur	19,60%
28	Sulawesi Tenggara	Kendari	35,50%
		Kolaka Utara	17,50%
29	Gorontalo	Gorontalo	23,30%

(Bersambung)

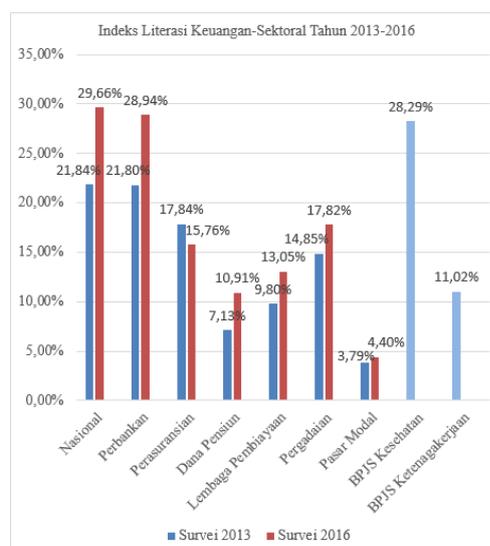
(Sambungan)

30	Sulawesi Barat	Mamuju	26,90%
31	Maluku	Ambon	28,30%
		Buru Selatan	24,10%
32	Maluku Barat	Ternate	27,30%
33	Papua Barat	Manokwari	19,30%
34	Papua	Jayapura	26,80%
		Timika	17,50%

Sumber: sikapiuangmu.ojk.go.id, 2016

Tabel 1.2 menunjukkan persentase indeks literasi keuangan per provinsi berdasarkan strata wilayah di Indonesia. Dilihat pada tabel 1.2 bahwa tingkat indeks keuangan di Kota Surabaya berada di urutan ketiga sebesar 45,9 persen setelah Kota Jakarta Selatan 58,4 persen dan Kota Bandung 49,2 persen. Kota Surabaya jika dibandingkan dengan kedua kota tersebut memiliki jumlah penduduk paling banyak dengan 2.762.308 jiwa, sedangkan Kota Jakarta Selatan 2.164.070 jiwa dan Kota Bandung 2.490.622 jiwa. Data jumlah penduduk Kota Surabaya yang lebih tinggi dengan tingkat literasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kedua kota tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat Kota Surabaya tergolong rendah.

Grafik 1.2 Indeks Literasi Keuangan-Sektoral Tahun 2013-2016



Sumber: Ojk.go.id, 2013 dan 2016

Pada grafik 1.2 menunjukkan bahwa persentase indeks literasi keuangan berdasarkan sektoral pada tahun 2013 dan 2016 diseluruh sektor mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Dapat diartikan bahwa masyarakat mulai belajar menggunakan jasa-jasa keuangan untuk mencapai kepuasan keuangannya.

Kepuasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang bersifat puas, kesenangan, dan kelegaan. Pengertian kepuasan keuangan menurut Roob dan Woodyard (2011) dalam Hakim, Euis, dan Tin (2014) adalah merupakan sudut pandang subjektif yang dirasakan individu dari ketersediannya sumber daya keuangan yang dimiliki. Dikutip dari ekonomi.kompas.com beberapa cara dapat dilakukan individu dalam meningkatkan kepuasan keuangannya yaitu, mengatur pengeluaran, menabung, memilih pembayaran kredit dengan lebih selektif, memiliki asuransi, dan melakukan investasi. Seseorang yang cerdas keuangan akan menyiapkan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan utama jaminan sosial menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, apalagi saat ini Indonesia memiliki 110 juta usia produktif. Jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi masalah makroekonomi (beritasatu.com). Jaminan sosial merupakan salah satu unsur penting untuk penopang ekonomi. Tetapi persentase jaminan sosial di Kota Surabaya dari tahun 2016 ke 2017 terjadi penurunan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial

Jenis Jaminan Sosial	Tahun	
	2016	2017
Jaminan Pensiun/Veteran	6,43 %	5,52 %
Jaminan Hari Tua	2,07 %	1,49 %

(Bersambung)

(Sambungan)

Asuransi Kecelakaan Kerja	2,08 %	2,24 %
Jaminan/Asuransi Kematian	1,16 %	1,05 %
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja	1,48 %	1,52 %

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, 2016 dan 2017

Pada tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pada tahun 2016 ke 2017 di beberapa jenis jaminan sosial seperti jaminan pensiun/veteran sebesar 0,91 persen, jaminan hari tua sebesar 0,58 persen, dan jaminan/asuransi kematian sebesar 0,11 persen. Jaminan pensiun mengalami penurunan paling tinggi, padahal saat usia produktif kita dapat mempersiapkan dengan tujuan kepuasan keuangan dapat terwujud. Menurut qmfinancial.com bahwa jaminan pensiun tidak dapat terwujud tanpa komitmen dan konsistensi karena banyak kendala yang dihadapi karyawan seperti tanggungan keluarga, sulit berinvestasi secara rutin, tidak mempunyai penghasilan lain, cicilan, dan sifat konsumtif,

Tingkat pemahaman keuangan rendah diakibatkan oleh tingginya angka konsumtif penduduk, khususnya pada usia non produktif yaitu 0-14 tahun dan 55 tahun keatas. Penduduk usia produktif dengan usia 15-55 tahun dengan pengetahuan dan pendidikan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per-kapita sebuah negara, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat hingga akhirnya tabungan masyarakat juga akan tinggi. Apabila tabungan usia produktif dialokasikan pada sektor produktif akan memacu terciptanya lapangan pekerjaan (indonesiana.tempo.co).

Tabel 1.4 Komposisi Tingkat Konsumsi, Cicilan, dan Tabungan Berdasarkan Tingkat Pendapatan per Bulan

Pendapatan	Rp1,39- 2, 78 Juta	Rp 2,97- 4,25 Juta	Rp4,53- 5,84 Juta	Rp6,09- 7,82 Juta	>Rp 7,82 Juta	Rata - Rata
Konsumsi	72,05%	70,59%	68,50%	67,36%	63,90%	69,69%

(Bersambung)

(Sambungan)

Cicilan/Pinjaman	10,91%	12,38%	14,57%	14,45%	17,11%	13,02%
Tabungan	17,03%	17,03%	16,93%	18,19%	18,99%	17,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Bank Indonesia, 2015

Menurut data Bank Indonesia pada tabel 1.4 menjelaskan mengenai tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih tinggi bahkan lebih dari setengah gaji setiap bulannya. Tabel 1.4 tersebut tertera bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia 69,69% digunakan untuk kegiatan konsumtif, lalu 13,02% untuk cicilan, dan 17,29% untuk kegiatan menabung. Kegiatan konsumtif didorong oleh perilaku masyarakat karena menyukai sesuatu yang sedang tren (Tribunnews.com).

Menurut liputan6.com bahwa pembayaran menggunakan kartu kredit merupakan tren di masyarakat. Kartu kredit dianggap memudahkan saat melakukan transaksi, tetapi banyak orang yang beranggapan bahwa kartu kredit menjadi malapetaka dalam urusan keuangan. Alat transaksi non tunai ini menjadi jenis pinjaman atau kredit konsumtif karena rata-rata memiliki bunga 2,25 persen per bulan atau 27 persen per tahun. Jika terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan akan dikenakan bunga yang sangat mahal (Kompas.com). Berikut ini data ketertarikan konsumen kartu kredit berdasarkan kota dan *socio-economics status*:

Tabel 1.5 Persentase Ketertarikan Konsumen Kartu Kredit Berdasarkan Kota, *Socio-Economics Status*, Usia, dan Pendidikan

Kriteria	Total	Usia			Pendidikan		Kota				SES	
		18-30 Tahun	31-40 Tahun	41-55 Tahun	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi	Jakarta	Bandung	Surabaya	Medan	A	B
Masih Menarik	78,4	71,9	80,6	78,4	77,3	80	79,2	65,8	81,3	85,4	78,2	80
Tidak Menarik Lagi	21,6	28,1	19,4	21,6	22,7	20	20,08	34,2	18,7	14,6	21,8	20

Sumber: Mars Indonesia, 2013

Dilihat pada tabel 1.5 berdasarkan kota, nasabah di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan merasa tertarik dalam penggunaan kartu kredit dengan persentase Jakarta 79,2 persen, Bandung 65,8 persen, Surabaya 81,3 persen dan Medan 85,4 persen. Lalu dilihat berdasarkan kelompok umur dan kelompok

pendidikan dengan latar belakang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, tingkat ketertarikan kartu kredit pada usia produktif lebih dari 50 persen.

Selain itu pada tabel 1.5, usia 18-55 yang termasuk usia produktif menjadi nasabah dengan tingkat ketertarikan diatas 50 persen. Total 17 juta kartu kredit di Indonesia itu saat ditelusuri pemiliknya hanya sekitar 7,5 juta orang. Artinya, satu orang biasanya memiliki antara 2-3 kartu kredit. Tiga transaksi terbesar penggunaan kartu kredit selama 10 tahun terakhir yaitu yang pertama pada toko grosir, lalu kedua toko eceran dan toko serba ada, serta ketiga makanan and minuman (jateng.tribunnews.com).

Penelitian sebelumnya dilakukan pada jurnal Xiao dan Porto (2017). Pendidikan Keuangan dan Kepuasan Keuangan: *Financial literacy, behavior, and capability as mediators. International Journal of Bank Marketing. Vol. 35 Issue: 5, pp. 805-817* yaitu menjelaskan bahwa pendidikan keuangan mempengaruhi terhadap kepuasan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui literasi keuangan, perilaku keuangan, dan kemampuan keuangan yang dilakukan pada Negara Amerika Serikat. Sehingga pada penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya serta menjadikan Kota Surabaya sebagai objek dalam penelitian. Dari kajian fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Peran Kemampuan Keuangan sebagai Mediator Pendidikan Keuangan dan Kepuasan Keuangan (Studi Kasus pada Usia Produktif di Kota Surabaya)”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Tingginya tingkat konsumsi masyarakat, turunnya kepemilikan atau penerima jaminan sosial, dan ketertarikan masyarakat memiliki kartu kredit di usia produktif menjadi fakta-fakta bahwa masyarakat kurang mengerti terhadap literasi keuangan. Harapannya dari peneliti ini adalah meningkatnya kepuasan keuangan pada masyarakat.

Rendahnya pendidikan keuangan di usia produktif dimana kemampuan keuangan sebagai mediator pendidikan dengan kepuasan keuangan harus ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Studi-studi terdahulu mengenai masalah kemampuan keuangan belum dilakukan di Kota

Surabaya sebagai studi kasus. Dikarenakan perbedaan faktor-faktor pada demografi dan geografi tersebut maka studi kasus untuk masalah tersebut di Kota Surabaya perlu untuk diteliti.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sebelumnya maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan keuangan?
2. Apakah kemampuan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan keuangan?
3. Apakah dampak yang ditimbulkan jika pendidikan keuangan pada kepuasan keuangan ketika diteliti dengan kemampuan keuangan lalu dibandingkan dengan pengaruh pendidikan keuangan pada kepuasan keuangan tanpa kemampuan keuangan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pendidikan keuangan mempunyai pengaruh terhadap kemampuan keuangan
2. Mengetahui apakah kemampuan keuangan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan keuangan
3. Mengetahui dampak pendidikan keuangan pada kepuasan keuangan ketika diteliti dengan kemampuan keuangan jika dibandingkan dengan pengaruh pendidikan keuangan pada kepuasan keuangan tanpa kemampuan keuangan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dengan topik yang serupa.

### 1.6.2 Aspek Praktis

1. Sebagai pedoman untuk usia produktif agar lebih mengetahui pentingnya pendidikan keuangan.
2. Sebagai wawasan usia produktif bahwa kemampuan keuangan penting sehingga mampu mencapai kepuasan keuangan.
3. Sebagai saran terhadap usia produktif di Kota Surabaya agar meningkatkan taraf baik yang berkaitan dengan kepuasan keuangan.

## **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I berisi mengenai tinjauan objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, literatur yang digunakan, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III berisi mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV berisi mengenai hasil dan pembahasan tentang karakteristik responden yang dilihat dari berbagai aspek, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran merupakan aspek yang diberikan kepada perusahaan dan saran bagi penelitian selanjutnya.